



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : TANGGUH PITONA
- Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
- NHK : 756812

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.500.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/128 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.780.000.000
- Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, Rp. 460.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 524.000.000

- MOBIL, MITSUBISHI COLT DIESEL HD 110PS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
- MOBIL, MAZDA CX-5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
- MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- MOBIL, SUZUKI CARRY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
- MOBIL, TOYOTA JEEP HARDTOP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 78.890.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 38.000.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----  
Rp. 4.140.890.000

III. HUTANG

Rp. 820.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.320.890.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.